

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah tidaklah terpisahkan dari pembangunan nasional, karena pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah ingin mendorong dan meningkatkan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan dan pengembangan daerah serta kesejahteraan penduduk. Kesenjangan laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu masalah serius dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi.

Lahirnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang desentralisasi fiskal, bertujuan untuk merespon ketimpangan pembangunan antar daerah sebagai akibat perbedaan kepemilikan sumberdaya. Dalam UU tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk memanfaatkan potensi yang ada guna mendorong pertumbuhannya. Namun demikian perbedaan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, menyebabkan kemajuan pembangunan di masing-masing daerah menjadi berbeda-beda. Oleh karena itu kebijakan pembangunan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada dan

berbeda-beda bagi masing-masing daerah. Proses tersebut dilakukan agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Namun hasil pembangunan terkadang masih dirasakan belum merata dan masih terdapat kesenjangan antar daerah.

Hal yang terpenting dalam pembangunan daerah adalah bahwa daerah tersebut mampu mengidentifikasi setiap potensi sektor-sektor potensial yang dimilikinya, kemudian menganalisisnya untuk membuat sektor-sektor tersebut memiliki nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah. Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah biasanya dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Hal ini dapat terpenuhi melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Masalah yang seringkali ditemui dalam proses pembangunan suatu daerah adalah ketidakserasian antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan, *Trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di masing-masing daerah selalu terjadi. Professor Kuznet mengemukakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk atau yang lazim disebut dengan ketimpangan yang tinggi. Namun pada tahap berikutnya hal tersebut akan membaik. Hipotesis ini dikenal dengan hipotesis “*U-Terbalik*” Menurut hipotesis ini perubahan distribusi pendapatan yang diukur melalui koefisien Gini dan pertumbuhan PDB perkapita akan terlihat seperti kurva yang

berbentuk huruf “U” terbalik. Menurut Kuznet distribusi pendapatan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000).

Lampung sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung selatan pulau Sumatera juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan distribusi pendapatan seperti apa yang dialami oleh daerah-daerah yang lainnya. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 diharapkan akan dapat mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah seperti yang sering terjadi selama ini. Dalam merespon UU nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU nomor 34 Tahun 2004 sejak 1 Januari 2001 provinsi Lampung telah menata daerahnya dengan mendirikan beberapa kabupaten baru, yang semula hanya terdiri dari 4 kabupaten menjadi 12 kabupaten dan 2 kota. Adanya pemekaran wilayah ini nampak di satu sisi tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/ kota terus mengalami peningkatan. Namun demikian tingkat pertumbuhan ekonomi ini nampak sangat bervariasi akibat perbedaan potensi yang dimiliki. Kondisi ini mengindikasikan adanya tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota yang akan menyebabkan timbulnya disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Lampung. Secara lebih jelas nilai PDRB sebagai indikator keberhasilan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2006-2011 (Juta Rupiah)

KABUPATEN/KOTA	2006	2007	2008	2009	2010	2011
LAMPUNG BARAT	1.211.457,60	1.286.066	1.351.525	1.427.754	1.509.472	1.578.014
TANGGAMUS	2.919.084,94	3.111.697	2.103.899	2.218.851	2.345.519	2.493.930
LAMPUNG SELATAN	4.461.417,78	3.721.149	3.908.442	4.114.980	4.350.044	4.612.550
LAMPUNG TIMUR	3.590.954,60	3.751.659	3.947.097	4.119.786	4.328.221	4.195.197
LAMPUNG TENGAH	4.948.565,51	5.255.606	5.255.606	5.553.010	5.883.047	6.587.165
LAMPUNG UTARA	2.686.696,38	2.855.121	3.017.663	3.208.506	3.368.213	3.368.213
WAYKANAN	1.174.166,34	1.219.881	1.275.967	1.340.230	1.409.576	1.487.011
TULANG BAWANG	3.816.362,89	3.816.362,89	4.357.683	2.129.602	2.261.365	2.385.679
BANDAR LAMPUNG	5.079.046,83	5.426.158	5.802.308	6.151.069	6.540.521	6.967.851
METRO	451.253,76	479.408	504.393	531.202	562.509	598.519
PROVINSI LAMPUNG	30.861.360	31.187.488	31.494.583	30.794.990	32.558.487	34.483.903

Sumber : Badan pusat statistik

Dari Tabel.1 di atas dapat terlihat bahwa PDRB kabupaten/kota di provinsi Lampung mempunyai perbedaan yang signifikan. PDRB tertinggi dari tahun 2006 hingga 2011 terdapat di kota Bandar Lampung , yaitu 5.079.046,83 pada tahun 2006 dan meningkat sebesar 6.967.851 pada tahun 2011. Dan PDRB terendah terdapat di kota Metro, yaitu sebesar 451.253,76 pada tahun 2006 dan 598.519 pada tahun 2011.

Dari nilai PDRB seperti yang dijelaskan di atas, dapat diperkirakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota juga akan berbeda. Kondisi ini sebagai akibat perbedaan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan kebijakan pembangunan dari masing-masing daerah. Gambaran tentang laju

pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di provinsi Lampung seperti pada tabel berikut:

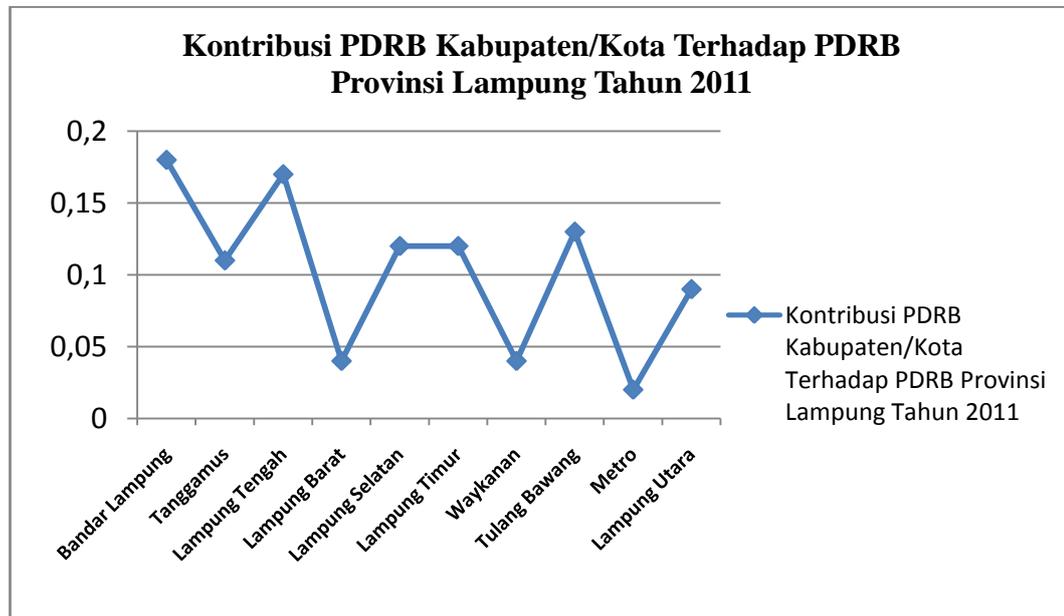
Tabel.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2006-2011

KABUPATEN/KOTA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Rata -Rata
1. LAMPUNG BARAT	3,5	5,88	5,09	5,64	5,74	4,54	5,06
2. TANGGAMUS	5,48	7,72	5,06	5,44	5,01	6,24	5,82
3. LAMPUNG SELATAN	-16,02	5,51	5,13	5,28	5,69	6,03	1,93
4. LAMPUNG TIMUR	1,54	4,46	5,21	4,38	5,1	6,08	4,46
5. LAMPUNG TENGAH	5,82	6,2	5,66	5,94	5,53	5,75	5,81
6. LAMPUNG UTARA	5,79	6,27	5,56	6,32	6,02	6,23	6,03
7. WAYKANAN	4,04	5,52	5,26	5,08	4,64	5,49	5,05
8. TULANG BAWANG	5,88	6,93	6,77	6,98	6,19	5,91	6,45
9. BANDAR LAMPUNG	6,3	6,83	6,81	6,01	6,33	6,53	6,46
10. METRO	5,7	6,24	5,21	5,32	5,89	6,4	5,79
PROVINSI LAMPUNG	4,98	5,94	5,57	5,63	5,61	5,87	5,6

Sumber : Badan pusat statistik

Dari kondisi tersebut terlihat adanya ketimpangan pembangunan di provinsi Lampung. Ini sebagai konsekuensi dari kepemilikan sumber daya alam yang berbeda antar kabupaten/kota. Sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan PDRB antar daerah maka tingkat pertumbuhan masing-masing kabupaten/kota juga akan mengalami perbedaan. Akibat dari perbedaan tingkat pertumbuhan ini menyebabkan kontribusi masing-masing kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung menjadi berbeda pula.

Gambar.1 Kontribusi PDRB Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Terhadap PDRB Provinsi Lampung Tahun 2011 (%)



Sumber Data : Data diolah

pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Daerah yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung dengan kontribusi sebesar 0,18 % dan daerah dengan persentase terendah adalah kota Metro. Kondisi ini diduga menyebabkan adanya tingkat disparitas pembangunan antara kabupaten/kota di provinsi Lampung. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: *“Disparitas Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2006-20011 “*.

provinsi Lampung hingga saat ini terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota. Namun dalam penelitian ini kabupaten/ kota yang menjadi objek analisis hanya dibatasi 8 kabupaten dan 2 kota. Hal ini mengingat 4 kabuapten di provinsi Lampung baru berdiri pada tahun 2008 dan tahun 2009. Keempat kabupaten baru tersebut sangat

tidak relevan jika dimasukkan dalam analisis karena kurun waktu analisis dalam penelitian ini antara tahun 2006 hingga tahun 2011. Sementara keempat kabupaten tersebut antara tahun 2007 hingga 2008 belum memiliki otoritas untuk mengelola daerahnya sendiri.

B. Permasalahan

Perbedaan potensi daerah di setiap kabupaten/kota yang ada di Propinsi Lampung dapat menyebabkan adanya daerah yang mengalami pertumbuhan yang tinggi dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi pula. Di samping itu ada pula daerah-daerah marginal yang tidak memiliki sumberdaya yang cukup, akan mengalami pertumbuhan yang lambat dengan pendapatan per kapita yang rendah. Masalah-masalah tersebut akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan yang akan membawa dampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang selanjutnya akan menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Provinsi Lampung yang terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 Kota, hanya ada beberapa kabupaten/kota saja yang memiliki tingkat PDRB perkapita dan rata-rata laju pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena itu diduga terjadi ketimpangan/disparitas pendapatan yang tinggi antar kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota tersebut.

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, nampak di satu sisi UU No.22 Tahun 1999 bertujuan untuk memacu pembangunan di daerah, di sisi lain sejak dilaksanakan-nya UU No.22 Tahun 1999 justru menimbulkan *gap* pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten/ kota.

Sehingga muncul suatu permasalahan, yaitu :

1. Berapa tingkat disparitas pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di provinsi Lampung dengan menggunakan Indeks Williamson ?
2. Bagaimana klasifikasi kabupaten/kota di Provinsi Lampung berdasarkan typologi klassen.
3. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pertumbuhan ekonomi ?
4. Berapa Tingkat pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tingkat disparitas pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Propinsi Lampung .
2. Untuk mengetahui klasifikasi Typologi masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Lampung .
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pertumbuhan ekonomi.
4. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan gambaran kepada pembaca mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Lampung, bagaimana ketimpangan yang ada dan kegiatan ekonomi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi kebijakan pembangunan pemerintah terutama yang terkait dengan pembangunan tenaga kerja, modal dan teknologi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya khususnya terkait masalah pertumbuhan ekonomi.

E. Kerangka Pemikiran

Pada hakekatnya tujuan pembangunan daerah yang ada ditekankan pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan potensi daerah secara terpadu guna membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kita ketahui bahwa setiap wilayah memiliki kekayaan, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tidak pernah sama. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan pada tingkat pembangunan daerahnya. Sebagai akibat dari perbedaan itu timbul jurang kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah .

hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tingkat pendapatan perkapita penduduknya, prasarana ekonomi, dan sosial budaya yang tersedia, struktur ekonominya dan tingkat pengangguran pada berbagai daerah yang ada.

Selain faktor diatas kurang mampunya daerah miskin berkembang cepat seperti daerah yang lebih kaya (maju) disebabkan pula oleh keadaan yang disebut dengan istilah *backwash effect* yang menyebabkan daerah kurang berkembang (miskin) menghadapi lebih banyak hambatan dalam mengembangkan ekonominya.

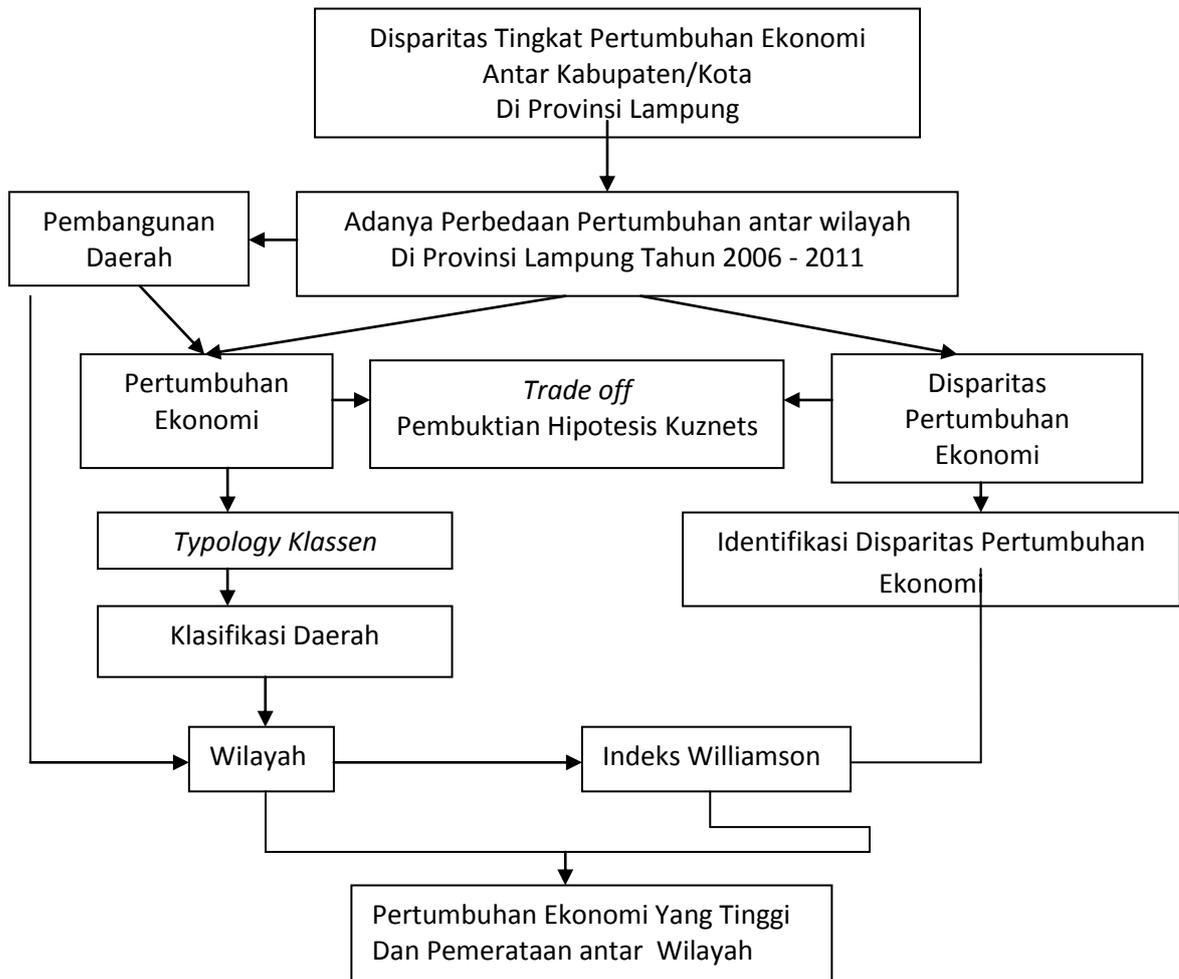
Kemajuan ekonomi tidak terjadi pada saat yang sama diberbagai daerah, pembangunan akan menciptakan konsentrasi ekonomi sekitar daerah dimana pertumbuhan terjadi (Tarigan:2006). Adanya perbedaan tingkat pembangunan antar daerah dapat menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan apabila pemerintah tidak secara aktif ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi.

Penentuan program dalam proyek pembangunan disusun melalui suatu mekanisme perencanaan pembangunan yang terpadu yang dimaksud untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah dan terwujudnya keterpaduan baik yang mencakup pembangunan sektoral maupun pembangunan regional. Campur tangan pemerintah juga dapat memperkecil ketimpangan wilayah akibat dari kesenjangan perekonomian yang ada antara daerah maju dengan daerah yang kurang berkembang adalah dengan merombak struktur ekonominya menjadi lebih kukuh dan dapat berkembang lebih pesat dimasa yang akan datang, membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja dideaerah yang terbelakang sehingga arus perpindahan penduduk dari daerah berkembang ke daerah maju semakin berkurang. Sehingga dengan keadaan

tersebut diharapkan bisa menaikkan pendapatan perkapita suatu penduduk. Dan terciptanya pertumbuhan yang berimbang.

Dalam penelitian ini untuk mengukur disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Lampung selama tahun 2006 – 2011 akan menggunakan *Indeks Williamson (IW)*, dengan besaran nilai antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai *IW* (mendekati 1), maka kesenjangan antar daerah semakin tinggi. Sebaliknya semakin kecil nilai *IW* (mendekati 0), maka semakin merata tingkat pendapatan antar kabupaten/kota. Kriteria lain dari *IW* ini adalah: (a) jika $IW < 0.3$ menunjukkan tingkat disparitas pendapatan yang terjadi rendah, (b) jika *IW* antara 0.3 – 0.5 termasuk kategori sedang, dan (c) jika nilai $IW > 0.5$ termasuk kategori tinggi. (Todaro,2000)

Selanjutnya untuk menentukan tingkat pertumbuhan dan kemajuan suatu daerah digunakan pendekatan *Typology Klassen*. Dalam analisis ini akan nampak suatu daerah termasuk dalam klasifikasi daerah yang maju, maju tertekan, berkembang cepat, atau justru merupakan daerah yang tertinggal. Indikator pengukuran analisis ini adalah pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita, serta percepatan pertumbuhan sektor-sektor dan pangasanya terhadap pertumbuhan tersebut. Keseluruhan analisis seperti yang disebutkan di atas secara digram dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis

Memperhatikan urian dalam kerangka pikir diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat disparitas pertumbuhan ekonomi anatar kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan taraf yang rendah.
2. Typologi pertumbuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Lampung memiliki perkembangan yang cepat.
3. Tingkat pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung mengalami perbedaan sehingga menyebabkan kontribusi PDRB antar kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Lampung berbeda pula.